

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. 2017. *Sanksi Perdata dan Adinistratif Terhadap Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrizakar. 2020. *Tabir Kesaktian Akta Notaris*. Depok: Khalifah Mediatama.
- Anand, G. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Amirin, Tatang M. 1995 *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badudu dan Zain. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar N. D., Mukti. Dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, Chandra M. 2015. *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup*". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

- \_\_\_\_\_. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat (Serba Serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Joeve.
- Manan, Abdul. 2010. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana
- Martono, Budi. 1994. *Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. S. 2007, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Muhammad. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan
- Prodjohamidjojo, Martiman 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasaid, M. Nur. 2003. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, Wawwan. 1995. *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. 1990. Jakarta: *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Sofyan, Andi 2015. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

- Sidabutar, Mangasa. 2001. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2022. *Putusan Pengadilan*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Tedjosaputro, Liliana. 1991. *Mal Praktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Etika Profesi Dan Etika Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Jakarta: Balai Pusat.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Eksekusi*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung

Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

### **C. Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Utr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 361/PID/2021/ PT MKS

### **D. Artikel Suatu Jurnal**

Devina Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2019).

Indira Agiasandrini dan Arsin Lukman, "Keabsahan Pembatalan Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Atas Permintaan Penjual Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, Nomor 1, (2023).

Jingga Mulia, et al, "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia", *Mendapo Journal of Administration Law*, Vol.3, No.3, (Oktober 2022).

Jurnal Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", *Lex Privatum*, Vol.III, No.2, (April-Juni 2015).

Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan*, Vol. 10, Nomor 123, (Desember 1995).

## **E. Tesis**

Afipuddin, "Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", *Tesis*, Universitas Narotama, 2017.

Redina Ariyani, "Analisis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Akta Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2024.

Yanti Taslim, "Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta", *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.